

Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan/ Keputusan/ Kebijakan

Dalam Proses Pembuatan Tahun 2026

Kementerian Komunikasi dan Digital RI



No	Judul	Tahapan Pembentukan	Satuan Kerja Pengampu
1	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pendekatan Kota Cerdas	Pelaksanaan harmonisasi eksternal setelah dilakukan Penyesuaian Draf RPM Kota Cerdas	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
2	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	Pembahasan Internal	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
3	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	Pembahasan Internal	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
4	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 Ghz	Telah mendapatkan izin prakarsa dan selanjutnya akan melakukan konsultasi publik	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
5	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Studio-to-Transmitter Link (STL) pada Pita Frekuensi Radio 300 MHz	Pembahasan Internal	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
6	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Komunikasi Land Mobile Radio	Pembahasan Internal	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
7	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Telah dilakukan reviu dan telah disampaikan kembali kepada pemrakarsa untuk diproses lanjut paraf sirkulasi	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital

No	Judul	Tahapan Pembentukan	Satuan Kerja Pengampu
8	Rancangan Surat Edaran tentang Pemberian Pertimbangan Kelayakan Operasi Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Telah dilakukan reviu dan telah disampaikan kembali kepada pemrakarsa untuk diproses lanjut paraf sirkuler	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
9	Rancangan Keputusan Menteri tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (WBS)	Dalam proses pembahasan internal dan pembahasan bersama Kemenpan RB untuk meminta masukan atas draf kepada Kemenpan RB dan satuan kerja di lingkungan Komdigi	Inspektorat Jenderal
10	Rancangan Keputusan Menteri tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komdigi	Dalam proses pembahasan internal dan pembahasan bersama Kemenpan RB untuk meminta masukan atas draf kepada Kemenpan RB dan satuan kerja di lingkungan Komdigi	Inspektorat Jenderal
11	Rancangan Pedoman Pengendalian Gratifikasi	Dalam proses pembahasan internal dan pembahasan bersama KPK untuk meminta masukan atas draf kepada KPK dan satuan kerja di lingkungan Komdigi	Inspektorat Jenderal
12	Rancangan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang	Direktorat Informasi Publik
13	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Pengusulan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2027	Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital
14	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pelimpahan Kewenangan Melalui Mandat dalam Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan Pegawai Instansi	Dalam proses sirkuler paraf	Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik
15	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional Tahun 2026-2029	Dalam proses penetapan oleh Presiden	Dit.AIKITA, Ekodig

No	Judul	Tahapan Pembentukan	Satuan Kerja Pengampu
16	Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial Nasional	Dalam proses penetapan oleh Presiden	Dit.AIKITA, Ekodig
17	Rancangan Peraturan Menteri Komunika dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakti	Dalam proses penandatanganan permohonan harmonisasi eksternal ke Kementerian Hukum	Biro SDMO
18	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi	Telah dilakukan harmonisasi internal dan pelaksanaan harmonisasi eksternal setelah dilakukan penyesuaian draf RPM Kamus Kompetensi	Biro SDMO
19	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tata Naskah Dinas	Telah diajukan konsultasi publik	Biro Umum
20	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Satu Data	Telah diajukan konsultasi publik	PDSI
21	Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penerapan Pelindungan Data Pribadi	Telah direviu dan dalam proses paraf oleh satker pemrakarsa	PDSI
22	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan dengan Nilai Perolehan Paling Banyak Rp100.000.000,00 per Unit/Satuan pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Batam	Telah direviu dan dalam proses penandatanganan	Biro Keuangan dan BMN
23	Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan dengan Nilai Perolehan Paling Banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) per Unit/Satuan pada Sekretariat Jenderal	Telah direviu dan dalam proses penandatanganan	Biro Keuangan dan BMN

No	Judul	Tahapan Pembentukan	Satuan Kerja Pengampu
24	Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Inteljen Negara	Telah direviu dan dalam proses penandatanganan	Biro Perencanaan
25	Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pusat Data dan Sarana Informatika	Telah direviu dan dalam proses penandatanganan	Biro Keuangan dan BMN
26	Permohonan koreksi Draf Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan Paling Banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) per Unit/Satuan pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Lampung	Dalam proses reviu	Biro Keuangan dan BMN
27	Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan dengan Nilai Perolehan Paling Banyak Rp100.000.000,00 per Unit/Satuan pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Padang	Dalam proses reviu	Biro Keuangan dan BMN
28	Rancangan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang	Direktorat Informasi Publik
29	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Pengusulan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2027	Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital
30	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pelimpahan Kewenangan Melalui Mandat dalam Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan Pegawai Instansi	Dalam proses sirkuler paraf	Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik

No	Judul	Tahapan Pembentukan	Satuan Kerja Pengampu
31	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional Tahun 2026-2029	Dalam proses penetapan oleh Presiden	Dit.AIKITA, Ekodig
32	Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial Nasional	Dalam proses penetapan oleh Presiden	Dit.AIKITA, Ekodig
33	Rancangan Peraturan Menteri Komunika dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakti	Dalam proses penandatanganan permohonan harmonisasi eksternal ke Kementerian Hukum	Biro SDMO
34	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi	Telah dilakukan harmonisasi internal dan akan dilaksanakan harmonisasi eksternal setelah dilakukan penyesuaian draf RPM Kamus Kompetensi	Biro SDMO
35	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tata Naskah Dinas	Telah diajukan konsultasi publik ke Menteri Komdigi	Biro Umum
36	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Satu Data	Telah diajukan konsultasi publik ke Menteri Komdigi	PDSI
37	Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penerapan Pelindungan Data Pribadi	Telah direviu dan dalam proses paraf oleh satker pemrakarsa	PDSI
38	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan dengan Nilai Perolehan Paling Banyak Rp100.000.000,00 per Unit/Satuan pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Batam	Telah direviu dan dalam proses penandatanganan	Biro Keuangan dan BMN

No	Judul	Tahapan Pembentukan	Satuan Kerja Pengampu
39	Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan dengan Nilai Perolehan Paling Banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) per Unit/Satuan pada Sekretariat Jenderal	Telah direviu dan dalam proses penandatanganan	Biro Keuangan dan BMN
40	Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Inteljen Negara	Telah direviu dan dalam proses penandatanganan	Biro Perencanaan
41	Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pusat Data dan Sarana Informatika	Telah direviu dan dalam proses penandatanganan	Biro Keuangan dan BMN
42	Permohonan koreksi Draf Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan Paling Banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) per Unit/Satuan pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Lampung	Dalam proses reviu	Biro Keuangan dan BMN
43	Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan dengan Nilai Perolehan Paling Banyak Rp100.000.000,00 per Unit/Satuan pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Padang	Dalam proses reviu	Biro Keuangan dan BMN